



INDRA PRASETYA/RADAR BALI

POLEMIK: Lahan pembuatan garam tradisional di Pantai Goa Lawah dicaplok investor.

Dicaplok Investor, Tantang Ukur Ulang

KLUNGKUNG - Adanya dugaan pencaplokan tanah negara di pinggir Pantai Goa Lawah. Tepatnya di Banjar Belatung Desa Pesinggahan-Wates (batas Klungkung-Karangasem) membuat pihak desa menantang investor. Perbekel Pesinggahan, Nyoman Suastika, menyarankan oknum investor yang memiliki lahan di atas tanah negara untuk bisa menunjukkan SPPT maupun sertifikatnya.

Perbekel Suastika mengaku, sejak pemberitaan keluhan petani garam mencuat di *Jawa Pos Radar Bali*. Nupati Klungkung Nyoman Suwirta, diakui telah turun langsung mencari tahu informasi tanah negara yang dicaplok oleh investor. Setelah bupati turun, dalam waktu dekat akan ada rapat bersama.

Dalam rapat, oknum investor yang diduga memiliki tanah di wilayah itu pun tentu akan diundang. "Kalau ada oknum yang memperlihatkan bukti-bukti, seperti SPPT atau sertifikat, kami akan melakukan pengukuran ulang," tegasnya kemarin (19/7). Dia menilai, dari hasil pembahasan sementara dengan bupati Suwirta, pihak terkait akan diundang. "Nanti akan ada rapat dengan pihak-pihak terkait, termasuk dari BPN (Badan Pertanahan Negara)," ujarnya.

Mengenai pengaduan petani garam tersebut, pihak desa berharap para petani garam bisa melapor ke kantor desa. "Supaya kami bisa tahu apa masalah petani garam," jelasnya. Di tempat terpisah Bupati Suwirta mengaku belum berani menyimpulkan mengenai permasalahan dugaan pencaplokan tanah negara oleh oknum investor tersebut. Pihaknya memilih mengagendakan rapat bersama. (dra/gup)

Edisi : Rabu, 20 Juli 2016

Hal : 29



Dugaan Korupsi Berbelok Jadi Pemalsuan

Perkembangan Terbaru Kasus Bansos Kicen

KLUNGKUNG - Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menyeret putra Anggota DPRD Klungkung Kicen Adnyana, yakni Krisnia Adiputra, melemem. Lambannya penanganan kasus yang dikenal dengan sebutan Bansos Kicen ini sempat menimbulkan kabar miring di kalangan masyarakat. Kabar berembus jika kasus korupsi itu sengaja dibelokkan sehingga menjadi kasus pemalsuan

tanda-tangan.

Menurut kabar dari lingkungan masyarakat, putra Kicen tersebut telah membayar uang ganti rugi kerugian negara sebesar Rp 200 juta. Uang ganti rugi tersebut telah diserahkan kepada negara. "Dengan membayar kerugian negara, tentu saja itu pengakuan dosa dari yang berkasus," ujar sumber yang dekat dengan para pejabat tersebut, kemarin (19/7).

Dia pun curiga, dengan lambannya penanganan kasus ini perlahan kasusnya akan dibelokkan dari korupsi menjadi pidana umum. "Bisa saja

dibelokkan ke pemalsuan tanda-tangan, jadi kena sedikit (hukuman) dia," jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Krisnia ini memalsukan surat permohonan bansos ke DPRD Klungkung. Krisnia diduga memalsukan tanda-tangan ketua panitia pembangunan dan tanda-tangan perbelokan desa setempat. Setelah berkasnya lengkap, Krisnia pun mendapatkan dana bansos melalui perpanjangan ayahnya Kicen Adnyana.

Mengenai kabar miring tersebut, Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP Wiastu Andri

Prayitno menampikinya. Dia mengaku Unit Tipikor Polres Klungkung yang menangani kasus itu masih menantikan perkembangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Bali.

"Kasus masih di audit BPKP," ujar Andri, dihubungi kemarin. Dia menjelaskan, audit telah dilakukan setelah pihak BPKP menyetujui penghitungan kerugian negara terhadap kasus tersebut. Ditanya sampai kapan melakukan audit. "Saya tidak tahu, tunggu saja," jelasnya.

Terkait kasus Bansos Kicen

ini, penyidik Polres telah memanggil beberapa orang penting di lingkungan Pemkab Klungkung. Diantaranya memanggil Plt Sekda Klungkung yang kini jadi Kepala Inspektorat IB Sudarsana, Sekda Klungkung Gede Winastra. Bahkan, terakhir, penyidik juga memanggil Anggota DPRD Kicen Adnyana selaku penyalur bansos itu. Sedangkan, Krisnia sebelumnya telah bolak-balik dipanggil penyidik. Karena kasusnya masih perhitungan BPKP, maka Krisnia sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi. (dra/gup)

Edisi : Rabu, 20 Juli 2016

Hal : 29



Radar Bali

DANA PENDIDIKAN ✓

Ketua Komite SMAN 1 Abiansemal Cuci Tangan

MANGUPURA - Dugaan penyelewengan penggunaan dana komite SMAN 1 Abiansemal, Badung saling cuci tangan. Penggunaan dana miliaran rupiah yang dipungut dari siswa SMAN 1 Abiansemal itu di duga diselewengkan. Ketua Komite SMAN 1 Abiansemal, I Gusti Nyoman Gunartha saat dikonfirmasi, Selasa (19/7) enggan menjelaskan mengenai penggunaan anggaran tersebut. Alasannya dia tidak hafal mengenai penggunaan dana komite tersebut. "Silahkan ke sekolah, saya tidak bisa kasi tau. Dana itu otoritas sekolah menggunakan dan yang pegang dana itu langsung sekolah yang pegang, tak ada komite yang pegang dana itu," kilahnya mengenai penggunaan dana komite itu.

Secara terpisah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Badung, Ketut Widia Astika mengatakan, Komite itu mengelola dana sendiri yang diambil dari iuran siswa. Sementara yang mengawasi penggunaan dana itu tentu orang tua siswa yang punya dana tersebut. Karena dia mempertanggungjawabkan dana komite itu kepada pemilik uang yakni pada orang tua siswa. "Komite itu mesti melaporkan penggunaan dana kepada orang tua siswa dan uangnya untuk apa dan lain sebagainya," jelasnya.

Kata dia, penentuan dana komite itu kesepakatan orang tua. Namun pengurusnya komite sekolah juga tidak boleh sewenang-wenang menggunakan uang itu. Programnya mesti jelas. Namun, kalau di SMAN/SMKN sesuai dengan ketentuan yang ada, memang masih boleh memungut uang dari komite tapi itu rasional dan pertanggungjawabannya jelas. "Kalau ada penyimpangan penggunaan dana di mana saja boleh untuk pengaduannya, kalau mengadakan ke kami di dinas kami siap untuk mediasi, mengecek dan lain sebagainya," terangnya. (dwi/rid) —

Edisi : Rabu, 20 Juli 2016

Hal : 23



Radar Bali

Bisa Separo Bergantian

Giliran Sekwan Diperiksa Tiga Jam

DENPASAR - Pemeriksaan dugaan korupsi dana perjalanan dinas (perdin) DPRD Kota Denpasar terus digeber Kejari Denpasar. Seluruh wakil rakyat kota Denpasar itu pun kini menunggu giliran diperiksa jaksa penyidik. Ini lantaran semua pihak yang terlibat dalam agenda perdin 2013 akan diperiksa. Nama IG Rai Suta, sekretaris dewan (sekwan) ✎

► **Baca Bisa... Hal 31**



Sampai semuanya diperiksa. Mungkin separe anggota dewan yang sekarang."

Syahrir Sagir
Kasi Intel Kejari
Denpasar



Setiap kunker saya tinggal terima kunci kamar hotel. Anggarannya berapa saya tidak tahu,"

AA Susruta
Fraksi Demokrat
DPRD Kota Denpasar

Pemeriksaan Maraton Kasus Perdin

- **Yang Bakal Diperiksa :** Semua anggota DPRD Kota Denpasar yang terlibat perdin 2013 akan dipanggil dan diperiksa. Bisa separe anggota dewan yang sekarang
- **Yang Diperiksa Kemarin :** IG Rai Suta, sekretaris dewan (sekwan) Kota Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra (Fraksi Demokrat), Ketut Arya Saputra (mantan anggota dewan Fraksi Demokrat) dan salah Nyoman Juana, mantan ajudan almarhum Ketua DPRD Kota Denpasar, Ketut Darsa
- **Yang Dipanggil Sebelumnya :** Ketut Nuada (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi

Demokrat), I Putu Oka Mahendra (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Golkar), I Nyoman Tamayasa (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Hanura), I Made Kayun (direktur Bali Travel Daksina) serta Gede Sutiawan (manajer marketing Bali Travel Daksina). Sementara dua orang yang tidak datang, adalah IB Putu Sudhayantana (travel Sunda Duta) dan Kadek Agus Arya Wibawa (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi PDIP)



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Rabu, 20 Juli 2016
Hal : 21



Yang Diduga Terlibat Semua akan Dipanggil

■ BISA

Sambungan dari hal 21

Kota Denpasar yang sebelumnya disebut-sebut bakal diamankan, kemarin (19/7) juga telah diperiksa penyidik Kejari Denpasar.

Rai Suta tidak sendiri. Selain Rai Suta, dua anggota dewan AA Susruta Ngurah Putra (Fraksi Demokrat) dan Ketut Arya Saputra (mantan anggota dewan Fraksi Demokrat) juga diperiksa. Salah satu staf Rai Suta juga ikut diperiksa. Staf yang diperiksa bernama Nyoman Juana. Juana diperiksa sebagai mantan ajudan almarhum Ketua DPRD Kota Denpasar, Ketut Darsa.

Informasi yang dirangkum koran ini menyebutkan bahwa di antara empat orang yang diperiksa, Rai Suta diperiksa paling lama. Yakni lebih dari tiga jam. Sementara Susruta dan Arya Saputra masing-masing satu jam. Jaksa penyidik mencecar Rai Suta lebih dari 20 pertanyaan. Inti dari pemeriksaan Rai Suta adalah, sekwan sebagai pejabat pengguna anggaran dinilai sebagai pihak paling mengetahui aliran dana serta mekanisme kunjungan kerja anggota dewan ke luar daerah.

Saat ini, yang dibidik Kejari Denpasar yakni agenda perdin tahun 2013. Selama setahun, agenda perdin mencapai Rp 6

miliar. Jika digabungkan dengan anggaran bintek, mencapai Rp 10 miliar. Nah, Kejari Denpasar fokus terhadap kerugian negara anggaran perdin saja.

Kasiintel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Kejari melanjutkan pemeriksaan perkara perdin. Pun dengan sekwan Rai Suta diperiksa sebagai saksi juga tak dibantah. "Sekwan diperiksa karena memang posisinya sebagai atasan aparatur sipil negara dan pengguna anggaran di sekretariat dewan DPRD Denpasar. Wajar jika pemeriksaan sekwan paling lama," terang Syahrir.

Terkait materi pemeriksaan, Syahrir menyebut pemeriksaan lebih banyak kepada peran sekwan dalam agenda perjalanan dinas. Sebagai pejabat tinggi di sekretariat DPRD Kota Denpasar, hampir semua anggaran yang digunakan atas izin serta pengetahuan Sekwan. "Kalau sekwan tidak tanda tangan, dananya *kan* tidak bisa cair," tandasnya.

Berarti ada kemungkinan sekwan jadi tersangka? Ditanya begitu, Syahrir menyebut tidak bisa berandai-andai. Penetapan tersangka tergantung pemeriksaan pihak terkait. Dijelaskan Syahrir, jika hasil pemeriksaan mengindikasikan sekwan terlibat, maka tidak menutup kemungkinan se-

kwan juga bakal jadi tersangka.

Menurut Syahrir, potensi tersangka juga bisa terjadi pihak lain. Tak terkecuali pihak travel yang digunakan selama kunjungan kerja. Sementara ini, pemeriksaan travel masih sebatas pengumpulan data adanya indikasi mark-up tiket perjalanan dinas. "Nah, indikasi *mark up* tiket ini kenapa bisa terjadi? Itulah yang akan kami dalami. Pokoknya semua pihak yang terlibat dalam perkara ini, bisa jadi tersangka. Tergantung hasil pemeriksaan nanti," beber Syahrir.

Sementara untuk dua anggota dewan yang diperiksa, Susruta dan Arya Saputra, Syahrir menyebut materinya tidak jauh beda dengan anggota dewan lain yang diperiksa sebelumnya. Yakni melengkapi pemeriksaan sebelumnya. Syahrir kembali menegaskan, semua anggota dewan yang terlibat perdin 2013 akan dipanggil dan diperiksa.

Sampai kapan pemeriksaan anggota dewan? "Sampai semuanya diperiksa. Mungkin separo anggota dewan yang sekarang," tukasnya.

Dikonfirmasi usai diperiksa, Susruta mengatakan, pemeriksaan dirinya melengkapi pemeriksaan sebelumnya. Politisi Demokrat itu mengaku memberikan keterangan dan data yang diperlukan penyidik. "Amplol waktu saya perjala-

nan dinas juga saya tunjukkan. Saya tidak ada beban, karena saya merasa tidak bersalah. Kalau pun dinyatakan bersalah, saya siap," terang Susruta.

Vokalis DPRD Denpasar itu menambahkan, selama kunjungan kerja dewan sudah terima beres. Mulai transportasi hingga hotel tempat menginap. "Setiap kunker saya tinggal terima kunci kamar hotel. Anggarannya berapa saya tidak tahu," terangnya.

Sehari sebelumnya, Kejari juga telah memeriksa tiga orang anggota dewan, dan dua orang dari Bali Travel Daksina. Data yang didapat *Jawa Pos Radar Bali*, sejatinya yang dijadwalkan diperiksa sebanyak tujuh orang.

Namun, dua orang tidak hadir. Mereka berlima yang hadir di Kejari Denpasar adalah Ketut Nuada (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Demokrat), I Putu Oka Mahendra (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Golkar), I Nyoman Tamayasa (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Hanura), I Made Kayun (direktur Bali Travel Daksina) serta Gede Sutiawan (manajer marketing Bali Travel Daksina). Sementara dua orang yang tidak datang, adalah IB Putu Sudhayantana (travel Sunda Duta) dan Kadek Agus Arya Wibawa (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi PDIP). (san/pit)

Edisi : Rabu, 20 Juli 2016

Hal : 31



Radar Bali



AHAS TEMUAN BPK: Gubernur dan Pimpinan dewan Bali rapat laporan pansus di ruang sidang utama DPRD Bali, kemarin.

Banyak Masalah, tapi Pemprov Dapat WTP

DENPASAR - Laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun, opini tersebut belum sepenuhnya mencerminkan bahwa permasalahan tata kelola keuangan daerah sudah berjalan baik dan sempurna. Pasalnya, temuan-temuan BPK dari tahun ke tahun belum sepenuhnya dapat diselesaikan.

"Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPK atas ketidaksesuaian dengan perundang-undangan juga masih belum terlaksana," ujar Ketua Pansus Ranperda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Bali 2015, I Nyoman Adnyana dalam Rapat Laporan Pansus antara DPRD Bali dengan Pemprov Bali di ruang sidang utama DPRD Bali, Selasa (19/7).

Politisi PDI Perjuangan asal Bangli ini menambahkan, dari komparasi hasil audit tahun-tahun sebelumnya, pihaknya kembali melihat beberapa permasalahan yang masih menjadi catatan penting BPK. Seperti persoalan aset, pengakuan utang piutang, tertib administrasi *performance* laporan dengan sistem akrual dan lainnya. Pemprov Bali pun disarankan melakukan langkah-langkah tepat agar

permasalahan itu tidak berulang-ulang menjadi temuan BPK. "Temuan BPK tidak boleh berulang tahun. Tapi WTP, kami semua berharap dapat terus berulang tahun," jelas Adnyana

Dicontohkan, temuan BPK terhadap penatausahaan piutang pajak kendaraan bermotor belum tertib merupakan temuan BPK tahun lalu. Tahun ini menjadi temuan lagi terhadap kekurangan penerimaan atas piutang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. "Catatan tahun lalu kami sarankan eksekutif untuk segera membuat rencana aksi dan segera

melakukan tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Eksekutif harus serius untuk menindaklanjuti temuan tersebut, karena berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah," imbuhnya.

Berdasarkan potret realisasi APBD Bali 2015, lanjut Adnyana, aspek perencanaan baik pendapatan, belanja dan SILPA di masa mendatang perlu lebih realistis, akurat, dan berhasil guna didasari data-data yang valid. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur, secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. (pra/dit)

Edisi : Rabu, 20 Juli 2016

Hal : 24